BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Deni (2023) Kebijakan Publik adalah keputusan maupun tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pejabat negara dalam menangani permasalahan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kebijakan publik, terdapat berbagai tahapan yang dilalui, mulai dari identifikasi isu kebijakan, pengembangan proposal kebijakan, hingga evaluasi kebijakan yang akan diterapkan. Menurut Gerston dalam Deni (2023) kebijakan publik merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap tingkat pemerintahan untuk menyelesaikan masalah publik. Adapun kebijakan publik menurut Anderson dalam Malian dkk., (2021) sebagai berikut:

> *A purposive course of action followed by an actor on set an actors in dealing with a problem or matter of concern*, atau suatu tindakan yang memiliki tujuan tersendiri yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah atau menangani suatu hal yang menjadi perhatian

Kebijakan publik dalam sudut pandang lain menurut Woll dalam Malian dkk (2021) Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Aktivitas ini bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui berbagai lembaga yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Semua tindakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi berbagai bentuk masalah yang muncul di tengah masyarakat dapat dikatakan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diputuskan oleh pejabat negara dalam menangani masalah publik dam memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses kebijakan publik mencakup berbagai tahapan, dimana pemerintah memainkan peran penting dalam setiap tahapan, baik melalui tindakan langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno dalam Siti (2022) kebijakan publik memiliki ciri-ciri seperti memiliki tujuan, bukan kebetulan atau acak. Dalam sistem politik modern, tindakan ini direncanakan. Kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang saling terikat, dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan tujuan tertentu dan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang, tetapi juga keputusan terkait implementasi dan penegakan hukum. Kebijakan terkait dengan pernyataan pemerintah tentang apa yang dianggap benar dalam bidang tertentu. Kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif, karena mencakup keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam menangani masalah yang ada, dan pemerintah harus ikut campur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Tahapan Kebijakan Publik

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, ada beberapa tahapan yang penting agar dapat mendukung kebijakan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu ada banyak pandangan dari beberapa para ahli dalam menentukan proses kebijakan tersebut.

Adapun pendapat Dunn dalam Rantung (2024) mengenai tahapan dalam penyusunan kebijakan publik sebagai berikut:

1) Penyusunan agenda
2) Formulasi kebijakan
3) Legitimasi atau adopsi kebijakan
4) Implementasi kebijakan
5) Evaluasi kebijakan

2. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*". Dalam kamus "*to implement*" berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu, dan "*to partical effect*" berarti menimbulkan efek atau dampak. Hal-hal yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak bisa berupa peraturan Undang-Undang, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan bernegara (Siti, 2022).

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan atau diterapkan, dengan melibatkan banyak aktivitas juga partisipasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pemerintah memegang peran krusial dalam seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari tahap awal hingga hasil akhirnya. Namun tidak sedikit kebijakan publik yang gagal diimplementasikan, kebijakan publik yang buruk dan gagal dalam pengimplementasiannya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat kebutuhan dan kepentingan masyarakat dimana pada akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi korban (Sutmasa, 2021).

Adapun Wahab dalam Yuliah (2020) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan bahwa :

> *policy implementation encompasses those actionsby public or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Implementasi kebijakan sangat luas, mencakup bagaimana pelaksanaan kebijakan sebagai alat administrasi hukum juga sebagai fenomena yang kompleks dari proses atau hasil dari kebijakan itu sendiri. Situmorang dalam Mansur (2021) juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam kebijakan publik dan merupakan variabel kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan isu-isu publik.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan, dengan melibatkan banyak pihak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga jika gagal akan merugikan masyarakat itu sendiri.

b. Model implementasi kebijakan

Dalam implementasi kebijakan ada beberapa model pendekatan yang disampaikan oleh para ahli termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Sebagaimana yang dirangkum oleh Agustino dalam Sutmasa (2021) sebagai berikut:

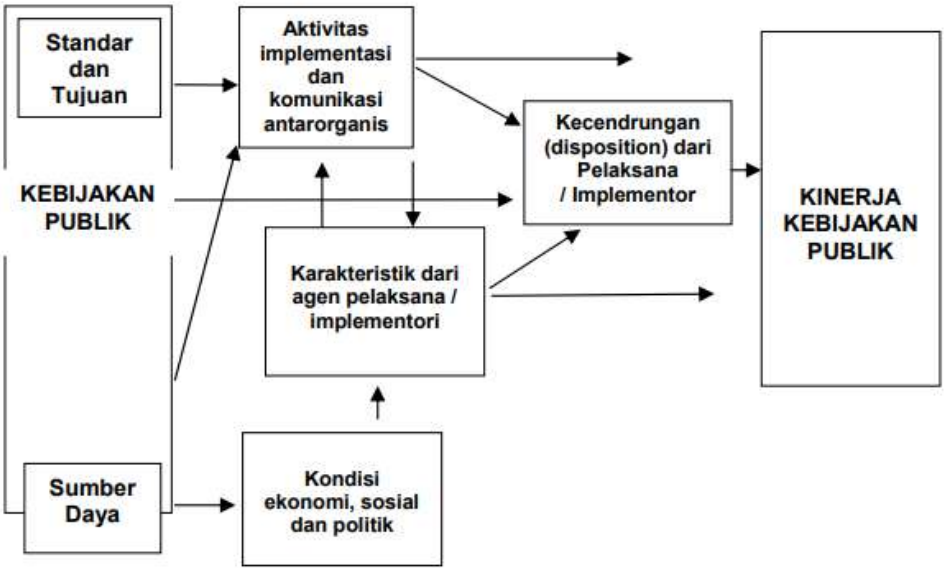
1) Model Van Meter dan Carl Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn merupakan pendekatan *top-down,* dimana model ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari keputusan politik yang ada, diikuti oleh pelaksanaan, dan akhirnya kinerja kebijakan. Dalam koteks model Van

Meter dan Van Horn, ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan publik yaitu:

a) Standar dan tujuan kebijakan
b) Sumber daya
c) Karakteristik agen pelaksana
d) Disposisi para pelaksana
e) Komunikasi antar organisasi
f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut
Van Meter dan Van Horn



Sumber : Suparno (2017)

2) Model Mazmanian dan Paul Sabatier

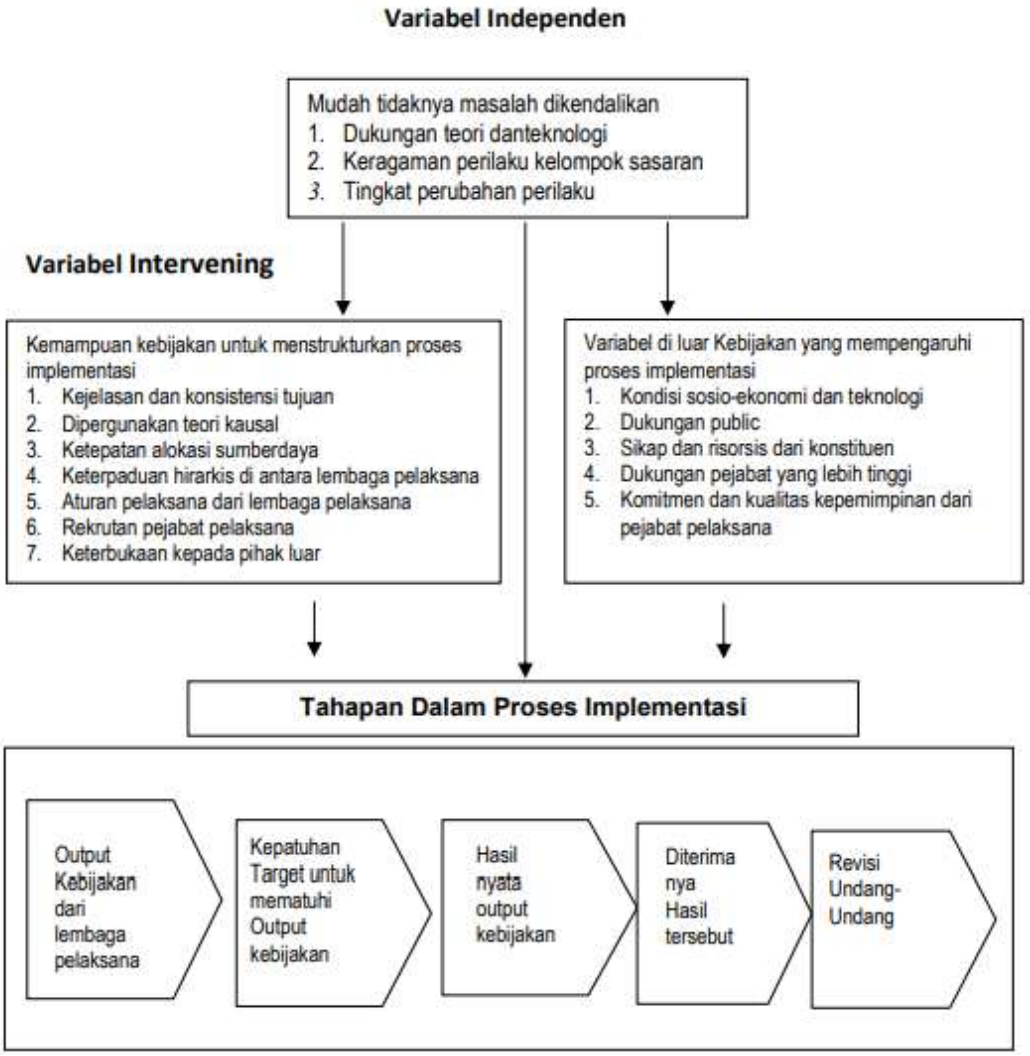
Pada model ini, implementasi kebijakan publik memiliki peran penting dimana kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan dalam proses implementasi. Adapun variabel yang memengaruhi, yaitu :

a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan ditangani

b) Kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi secara tepat

c) Variabel-variabel di luar Undang-Undang

Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan Menurut
Mazmanian dan Paul Sabatier



Sumber : Suparno (2017)

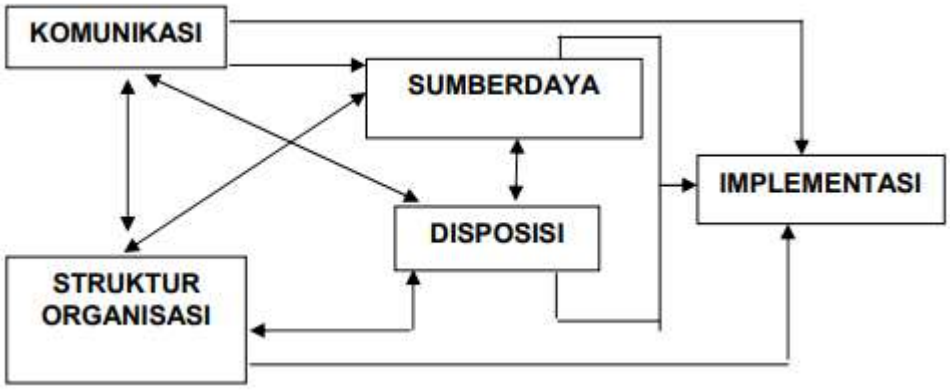
3) Model George C. Edward III

Pendekatan model George C. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang bersifat politis dan administratif. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dinilai dari pencapaian hasil

akhirnya, apakah tujuan yang ingin dicapai terpenuhi atau tidak. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dai dua hal, yaitu:

a) Komunikasi
b) Sumber daya
c) Disposisi
d) Struktur birokrasi

Gambar 3
Model Implementasi Kebijakan Menurut George C: Edward III



Sumber : Suparno (2017)

4) Model Merilee S. Grindle

Pendekatan model Grindle melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang bersifat politis dan administratif. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dinilai dari pencapaian hasil akhirnya, apakah tujuan yang ingin dicapai terpenuhi atau tidak. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dai dua hal, yaitu:

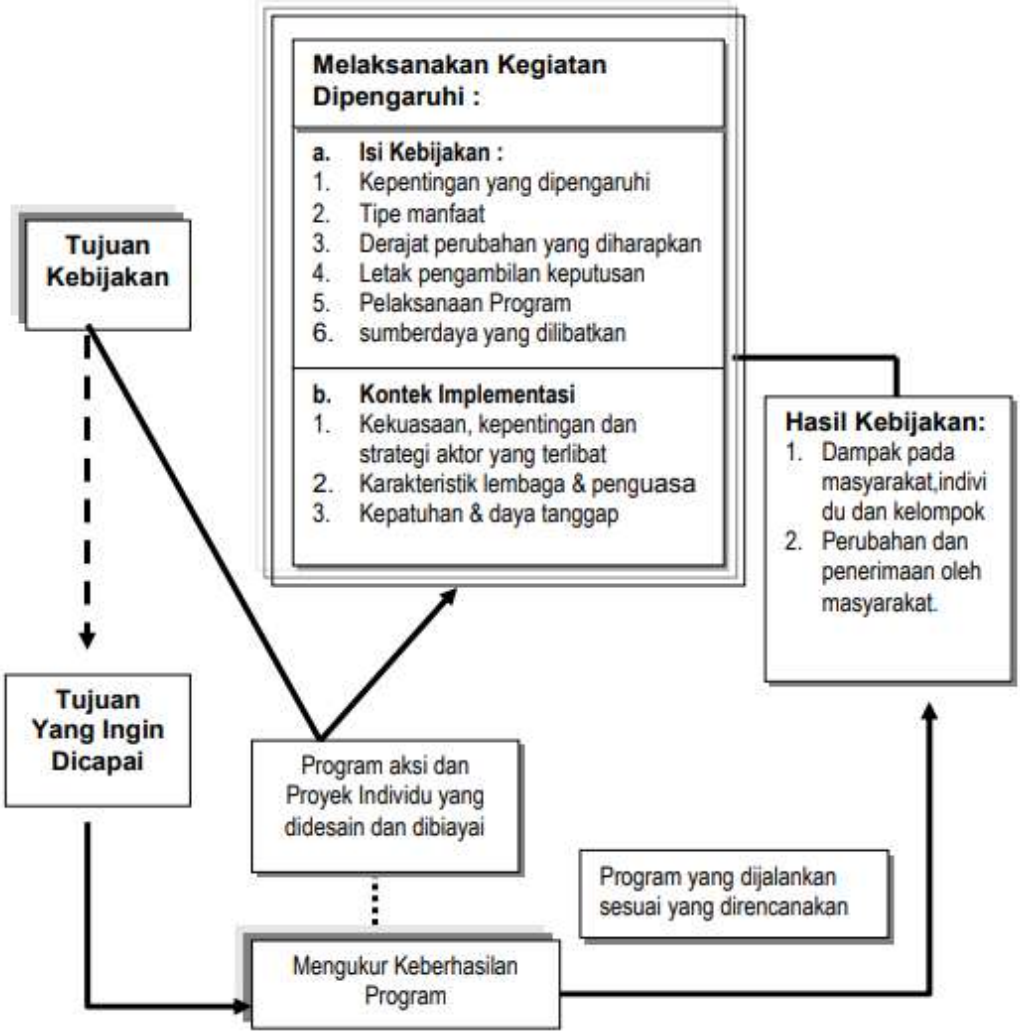
a) Proses
b) Tujuan

Kemudian, dalam pendekatan Grindle juga memiliki prinsip dimana keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat ditentukan dari tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari:

a) Isi kebijakan (*content of policy*)

b) Konteks kebijakan (*context of policy*)

Gambar 4
Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S Grindle



Sumber : Suparno (2017)

3. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan ini diimplementasikan dengan mengacu kepada PERDA Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Ada 6 komponen dalam SKTB yaitu :

a. Kurikulum
b. Deteksi Dini
c. Satuan Kredit Semester
d. Penilaian Kegiatan
e. Remedial/Klinik Dini
f. Pengayaan

4. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian dan landasan teori diatas, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu dengan yaitu dengan mengkaji beberapa variabel yang memengaruhi proses dan juga mengukur keberhasilan kebijakan. Maka kerangka pikir yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu :

a. Standar dan tujuan kebijakan

Variabel ini mengidentifikasi apa yang menjadi standar dan juga apa yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu.

b. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor yang penting karena menjadi alat bantu keberlangsungan dalam implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu.

c. Karakteristik agen pelaksana

Bagaimana kedisiplinan dan patuhan para pelaksana terhadap regulasi yag mengatur terkait implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu, serta kerjasama yang dilakukan antara agen pelaksana yang terlibat.

d. Sikap para pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana menjadi variabel yang penting dalam menjalankan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu, dimana sikap tersebut meliputi komitmen, dan seberapa responsif serta antusias pelaksana terhadap kelompok sasaran.

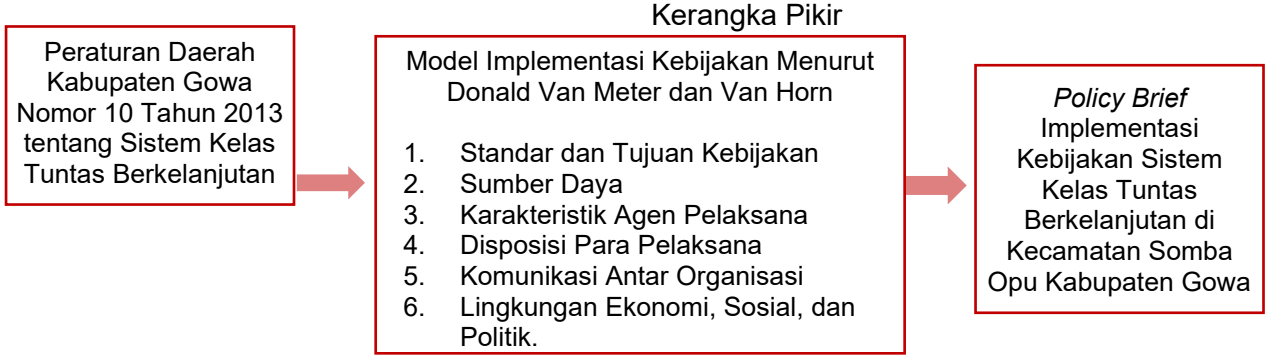
e. Komunikasi antar organisasi

Koordinasi melalui komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu terkait kegiatan-kegiatan secara akurat dan konsisten.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gowa, peran lingkungan ikut serta dalam mendorong keberhasilan.

Gambar 5
Kerangka Pikir



Sumber: Agustino (2006)

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan menjelaskan bahwa *Policy Brief* adalah

> “dokumen ilmiah yang ditulis secara singkat, jelas, dan memiliki fokus pada masalah kebijakan tertentu, serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang membutuhkan perhatian segera dari pembuat kebijakan”.

Policy Brief atau ringkasan kebijakan adalah dokumen yang memberikan alasan untuk mendukung pilihan kebijakan tertentu atau tindakan yang sedang dijalankan. Dengan tujuan untuk mengajukan argumen yang jelas tentang pentingnya alternatif yang diusulkan, meyakinkan audiens akan urgensi masalah yang ada, serta mendorong tindakan nyata. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah melalui kebijakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan (Tawil, 2023)**.**

Dari penjelasan di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa *policy brief* merupakan dokumen ringkas tetapi jelas yang fokus pada isu kebijakan tertentu, dimana memiliki tujuan untuk memberikan solusi alternatif terhadap masalah kebijakan. Selain itu, *policy brief* juga dirancang untuk menyampaikan argumen yang meyakinkan mengenai pentingnya alternatif yang diusulkan.

2. Tujuan *Policy Brief*

Secara umum tujuan dari *policy brief* berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan adalah

> “mendukung pembuatan kebijakan atau keputusan yang dilakukan dengan mendasar pada informasi yang relevan dan berbasis bukti (*evidence-based*), oleh organisasi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau memuat keputusan”.

Namun adapun tujuan utama dari penyusunan *policy brief* menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan yaitu sebagai media eksplorasi dan advokasi. Sebagai media eksplorasi, *policy brief* tidak hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi terpilih, tetapi juga menyelidiki dan mengeksplorasi berbagai opsi kebijakan yang paling

memungkinkan. Selain itu, sebagai media advokasi, dimana *policy brief* memberikan argumen yang kuat dalam mendukung satu solusi tertentu untuk diimplementasikan. Penulis *policy brief* harus melakukan analisis mendalam, karena hasil dari analisis tersebut akan sangat memengaruhi rekomendasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan, sehingga mereka dapat memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai dan efektif untuk diterapkan.

3. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, sistematika penulisan *policy brief* memuat beberapa komponen sebagai berikut:

a. Judul
    1) Pembaca lebih tertarik jika menarik sehingga ingin mengetahui lebih lanjut.
    2) Menghidupkan minat pembaca.
    3) Singkat, padat, dan jelas tetapi mewakili isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif
    1) Memiliki faktor yang menjadi penyebab akar permasalahan.
    2) Mengapa permasalahan tersebut harus/strategis.
    3) Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    4) Siapa yang memiliki peran dalam menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
    1) Berisi kalimat ringkas tetapi memberikan minat untuk dibaca secara keseluruhan
    2) Menjelaskan kepentingan dari masalah yang diangkat.
d. Deskripsi masalah
    1) Fokus pada inti permasalahan.
    2) Memberikan bukti pendukung yang memadai (*evidence-based*).
    3) Menganalisis (apa, siapa, mengapa, dampak atau efek).
    4) Rekomendasi
    5) Fokus dalam memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat secara spesifik.
    6) Solusi yang ditawarkan harus dipastikan apakah sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan dan juga faktor-faktor lain yang ada.
    7) Opsi lain (termasuk analisis singkat, metode penentuan opsi yang dipilih).
e. Apendiks (jika diperlukan)
f. Referensi utama